

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Sebuah Tinjauan Konseptual, Metodologis, dan Praktis



BENI AKHMAD, S.AP.,M.A.P
YULIANIS SAFRINADIYA RAHMAN S.H.,M.H
JUNAIDY, S.Sos.,M.I.Kom.,M.AB

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Sebuah Tinjauan Konseptual, Metodologis, dan Praktis

Beni Akhmad, S.AP., M.A.P
Yulianis Safrinadiya Rahman S.H., M.H
Junaidy, S.Sos., M.I.Kom., M.AB

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sistem Perencanaan pembangunan Perdesaan dan Perkotaan

Copyright@2026

Penyusun:

Beni Akhmad, S.AP., M.A.P
Yulianis Safrinadiya Rahman S.H., M.H
Junaidy, S.Sos., M.I.Kom., M.AB

Penata Letak:

Afipah

Pendesain Sampul:

Tim Ruang Karya

Diterbitkan oleh:

Ruang Karya

Alamat:

Jl. Martapura lama, Km. 07, RT. 07 Kecamatan Sungai Tabuk, Kelurahan Sungai Lulut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Telp. 0897-1169-692

Email: kirimnaskah@ruangkarya.id

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Cetakan Pertama Mei 2026

639 Halaman, Ukuran A5

ISBN:

Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada buku ini, harap menghubungi Penerbit. Terima kasih

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku referensi yang berjudul **"Sistem Perencanaan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan: Sebuah Tinjauan Konseptual, Metodologis, dan Praktis"** ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan di Indonesia, yang menuntut pemahaman mendalam mengenai dinamika antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Keduanya bukan lagi entitas terpisah, melainkan sebuah spektrum yang saling terkait dan memengaruhi, sehingga memerlukan pendekatan perencanaan yang terintegrasi dan holistik.

Penyusunan buku ini didasari oleh kebutuhan akan sebuah literatur komprehensif yang mampu menjembatani teori-teori fundamental perencanaan dengan aplikasi praktis di lapangan, khususnya dalam konteks regulasi dan kondisi sosial-ekonomi di Indonesia. Materi yang disajikan di dalamnya dirancang untuk dapat diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa program studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Administrasi Publik, Ilmu Pemerintahan, hingga para praktisi di lembaga pemerintahan seperti

Bappeda, dinas teknis, serta para konsultan dan pegiat pembangunan.

Penulis menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan di edisi-edisi mendatang. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perencanaan pembangunan di tanah air.

[Kota Penulis], [Tanggal]

[Nama Lengkap Penulis]

KATA PENGANTAR

Dinamika pembangunan wilayah di abad ke-21 menempatkan perencana di persimpangan jalan antara tuntutan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Buku **"Sistem Perencanaan Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan"** hadir sebagai upaya untuk membedah kompleksitas ini secara sistematis. Buku ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan kumpulan teori, tetapi juga sebagai panduan untuk memahami bagaimana teori-teori tersebut dioperasionalkan dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) di Indonesia, mulai dari level makro hingga mikro di tingkat desa.

Pembahasan dalam buku ini sengaja dirancang dengan alur yang logis, dimulai dari pengenalan konsep-konsep dasar dan filosofi perencanaan pada Bab 1, dilanjutkan dengan eksplorasi teori-teori lokasi dan pertumbuhan wilayah yang menjadi fondasi analisis pada Bab 2. Selanjutnya, pembaca akan diajak mendalami mekanisme SPPN, metodologi analisis, hingga masuk ke dalam substansi perencanaan di wilayah perdesaan dan perkotaan secara spesifik. Titik kulminasi dari buku ini terletak pada analisis keterkaitan

desa-kota (*rural-urban linkages*), isu-isu kontemporer, dan studi kasus yang relevan, yang diharapkan dapat memberikan perspektif utuh bagi para pembaca.

Salah satu kekuatan utama buku ini adalah upayanya untuk mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan, ekonomi, sosial, dan lingkungan, dalam setiap analisisnya. Dengan demikian, pembaca tidak hanya memahami "apa" dan "bagaimana" merencanakan, tetapi juga "mengapa" sebuah pilihan kebijakan pembangunan perlu diambil dengan mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh. Semoga kehadiran buku ini dapat memperkaya khazanah literatur perencanaan pembangunan di Indonesia dan memantik diskusi-diskusi kritis untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan intelektual selama proses penulisan buku ini.

Hormat saya,

[Nama Lengkap Penulis]

DAFTAR ISI

PRAKATA 6

KATA PENGANTAR 8

DAFTAR ISI 10

BAB 1: KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Definisi dan Filosofi Perencanaan Pembangunan 4

1.1.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan 6

1.1.2 Filosofi dan Tujuan Jangka Panjang Pembangunan 9

1.1.3 Perbedaan antara Perencanaan, Program, dan Proyek. 13

1.2 Evolusi dan Sejarah Perencanaan Wilayah 16

1.2.1 Sejarah Perkembangan Konsep Regional Planning 18

1.2.2 Era Pembangunan Nasional dan Peran Pemerintah 21

1.2.3 Kontekstualisasi Teori Barat dalam Konteks Indonesia 25

KESIMPULAN 28

BAB 2: TEORI-TEORI LOKASI DAN PERTUMBUHAN WILAYAH 31

PENDAHULUAN 31

2.1 Teori Lokasi Klasik dan Pengaruhnya 34

2.1.1 Teori Lokasi Industri oleh Weber 35

2.1.2 Teori Lokasi Pertanian oleh Von Thünen..... 38
2.1.3 Analisis Biaya Transportasi dalam Penentuan Lokasi 41
2.2 Teori Tempat Sentral (Central Place Theory)..... 45
2.2.1 Konsep Hierarki Permukiman oleh Christaller..... 46
2.2.2 Prinsip Pemasaran dan Jangkauan Pelayanan..... 49
2.2.3 Kritik dan Adaptasi Teori Tempat Sentral..... 51
2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah 55
2.3.1 Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) 56
2.3.2 Model Pertumbuhan Neoklasik (Solo Model)..... 59
2.3.3 Konsep Multiplier Effect dalam Pembangunan Regional 63
2.4 Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Pole Theory) 67
2.4.1 Konsep Pusat Inovasi dan Efek Penjalaran (Spread Effect)..... 68
2.4.2 Peran Industri Unggulan sebagai Pemicu Pertumbuhan 71
2.4.3 Isu Kesenjangan dan Efek Penghisapan (Backwash Effect)..... 75
2.5 Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) 78
2.5.1 Definisi dan Pilar Pembangunan Berkelanjutan 79
2.5.2 Konsep Keseimbangan Antargenerasi..... 83
2.5.3 Penerapan Prinsip Berkelanjutan dalam Perencanaan Tata Ruang 86
KESIMPULAN 89

BAB 3: SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SPPN) 92
PENDAHULUAN 92
3.1 Hierarki Dokumen Perencanaan Pembangunan 95
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 96
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 100
3.1.3 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 103
3.2 Keterkaitan antara Perencanaan Pembangunan dan Anggaran 106
3.2.1 Sinkronisasi Dokumen Rencana dengan APBN/APBD 108
3.2.2 Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja 109
3.2.3 Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Anggaran 111
3.3 Mekanisme Perencanaan Partisipatif (Musrenbang) 112
3.3.1 Tujuan dan Tahapan Pelaksanaan Musrenbang 113
3.3.2 Peran Aktif Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan 115
3.3.3 Tantangan Inklusivitas dalam Forum Musrenbang 116
3.4 Peran dan Fungsi Lembaga Perencanaan 117
3.4.1 Tugas dan Wewenang Bappenas/Bappeda 118
3.4.2 Koordinasi Horizontal dan Vertikal Antar-lembaga 119
3.4.3 Hubungan Kerja dengan Lembaga Non-Pemerintah 120
3.5 Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana 121
3.5.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Pembangunan 123

3.5.2 Mekanisme Monitoring dan Pelaporan Berkala 124

3.5.3 Evaluasi Dampak Pembangunan (Impact Evaluation) 124

KESIMPULAN 126

BAB 4: METODOLOGI ANALISIS DALAM PERENCANAAN 128

PENDAHULUAN 128

4.1 Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 131

4.1.1 Penerapan Analisis SWOT untuk Identifikasi Masalah 132

4.1.2 Teknik Matriks TOWS untuk Perumusan Strategi ... 136

4.1.3 Keterbatasan dan Kelemahan Analisis SWOT 139

4.2 Analisis Kebutuhan Dasar dan PDRB 143

4.2.1 Pendekatan Kebutuhan Dasar (Basic Needs Approach) 144

4.2.2 Penggunaan PDRB untuk Mengukur Pertumbuhan Ekonomi 147

4.2.3 Analisis Sektoral PDRB dan Sektor Unggulan 151

4.3 Analisis Model Input-Output (I-O) dan Shift-Share 154

4.3.1 Dasar-dasar dan Aplikasi Model I-O 156

4.3.2 Kegunaan Analisis Shift-Share dalam Mengidentifikasi Keunggulan 157

4.3.3 Interpretasi Hasil Analisis I-O dan Shift-Share 159

4.4 Metode Delphi dan Proyeksi Demografi 160

4.4.1 Penggunaan Metode Delphi untuk Prediksi Masa Depan 162
4.4.2 Teknik Proyeksi Penduduk (Metode Komponen) 164
4.4.3 Analisis Kebutuhan Lahan dan Infrastruktur Berdasarkan Proyeksi 165
4.5 Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) 167
4.5.1 Peran GIS dalam Pemetaan dan Analisis Spasial 168
4.5.2 Teknik Overlay dan Buffer Analysis 169
4.5.3 Integrasi Data Spasial dan Non-Spasial dalam Pengambilan Keputusan 171
KESIMPULAN 173
BAB 5: PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (KONSEP) 175
PENDAHULUAN 175
5.1 Definisi dan Karakteristik Wilayah Perdesaan 178
5.1.1 Perbedaan Definisi Desa Berdasarkan Regulasi 179
5.1.2 Karakteristik Sosial, Ekonomi, dan Ekologis Desa 182
5.1.3 Klasifikasi dan Tipologi Desa 185
5.2 Prinsip Dasar Pembangunan Desa (Undang-Undang Desa) 188
5.2.1 Prinsip Partisipasi dan Keberlanjutan 189
5.2.2 Prinsip Kewenangan Berbasis Hak Asal Usul 191
5.2.3 Otonomi Desa dan Kedaulatan Lokal 194
5.3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa 196

5.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 198
5.3.2 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) 200
5.3.3 Peraturan Desa tentang APBDes 203
5.4 Sumber Daya dan Aset Desa 206
5.4.1 Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Desa 207
5.4.2 Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) Desa 209
5.4.3 Aset Desa (Tanah Kas Desa, Bangunan, dll.) 211
5.5 Peran Pendampingan dan Fasilitasi Pembangunan Desa . 213
5.5.1 Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) 214
5.5.2 Mekanisme Transfer Pengetahuan dan Teknologi ... 216
5.5.3 Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Kelembagaan Desa 218
KESIMPULAN 220
BAB 6: PENGELOLAAN DANA DESA DAN PEMBERDAYAAN 222
PENDAHULUAN 222
6.1 Kebijakan Transfer Dana Desa dari Pusat 225
6.1.1 Dasar Hukum dan Alokasi Dana Desa 226
6.1.2 Formula dan Mekanisme Penyaluran Dana Desa 228
6.1.3 Akuntabilitas dan Transparansi Penggunaan Dana .. 231
6.2 Prioritas Penggunaan Dana Desa 233
6.2.1 Prioritas untuk Pembangunan Infrastruktur Dasar ... 234
6.2.2 Prioritas untuk Pemberdayaan Masyarakat 235

6.2.3 Prioritas untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting 236
6.3 Mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa 238
6.3.1 Forum Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes 239
6.3.2 Pengambilan Keputusan yang Inklusif dan Kolektif. 240
6.3.3 Tahapan Penyusunan dan Penetapan RKPDes 241
6.4 Peningkatan Kapasitas Ekonomi Masyarakat Desa 243
6.4.1 Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 244
6.4.2 Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 245
6.4.3 Promosi Produk Unggulan Desa (One Village One Product) 246
6.5 Kelembagaan Sosial dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa 247
6.5.1 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) .. 249
6.5.2 Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 250
6.5.3 Penguatan Organisasi Pemuda dan Karang Taruna... 251
KESIMPULAN 252
BAB 7: PERENCANAAN TATA RUANG PERDESAAN 254
PENDAHULUAN 254
7.1 Prinsip Dasar Pengelolaan Tata Ruang Desa 257
7.1.1 Konsep Tata Ruang Desa dan Batas Administrasi 258

7.1.2 Sinkronisasi Tata Ruang Desa dengan RTRW Kabupaten 260
7.1.3 Isu Konflik Pemanfaatan Ruang di Desa..... 262
7.2 Perencanaan Lahan Pertanian dan Ketahanan Pangan..... 264
7.2.1 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)..... 265
7.2.2 Perencanaan Irigasi dan Infrastruktur Pertanian..... 267
7.2.3 Diversifikasi Usaha Tani dan Komoditas Unggulan 268
7.3 Perencanaan Infrastruktur Dasar Perdesaan..... 270
7.3.1 Pengembangan Jaringan Jalan Desa dan Aksesibilitas 271
7.3.2 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan 273
7.3.3 Pembangunan Jaringan Listrik dan Telekomunikasi 275
7.4 Isu Konservasi Lingkungan dan Bencana di Desa..... 277
7.4.1 Perencanaan Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas 278
7.4.2 Pengelolaan Hutan Desa dan Sumber Daya Air..... 280
7.4.3 Peran Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan 282
7.5 Pengembangan Kawasan Perdesaan (Kawasan Agropolitan/Minapolitan)..... 283
7.5.1 Konsep dan Tujuan Pengembangan Kawasan Perdesaan 285
7.5.2 Mekanisme Koordinasi Antar-Desa 286
7.5.3 Pembangunan Pusat Pelayanan Kawasan..... 288
KESIMPULAN 290

BAB 8: PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN (KONSEP) 292
PENDAHULUAN 292
8.1 Definisi dan Karakteristik Wilayah Perkotaan 295
8.1.1 Pengertian Kota dan Kriteria Klasifikasi Kota 296
8.1.2 Karakteristik Sosial-Ekonomi dan Fisik Kota 298
8.1.3 Konsep Urbanisasi dan Pertumbuhan Kota 299
8.2 Teori Struktur Internal Kota 301
8.2.1 Model Konsentris (Burgess) 302
8.2.2 Model Sektor (Hoyt) 304
8.2.3 Model Inti Berganda (Harris dan Ullman) 305
8.3 Permasalahan Krusial Perkotaan 307
8.3.1 Permasalahan Kemacetan dan Transportasi 308
8.3.2 Permasalahan Perumahan Kumuh (Slum Area) 310
8.3.3 Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Limbah 311
KESIMPULAN 313
BAB 9: PERENCANAAN TATA RUANG PERKOTAAN 316
PENDAHULUAN 316
9.1 Hierarki Dokumen Tata Ruang Perkotaan 318
9.1.1 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 320
9.1.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota 322
9.1.3 Zonasi dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 324
9.2 Perencanaan Kawasan Pusat Kota (Central Business District/CBD) 326

9.2.1 Fungsi dan Karakteristik CBD 327
9.2.2 Regulasi Ketinggian Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 328
9.2.3 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik 329
9.3 Perencanaan Transportasi Perkotaan Berkelanjutan 331
9.3.1 Konsep Transit-Oriented Development (TOD) 332
9.3.2 Perencanaan Angkutan Umum Massal (Bus Rapid Transit/MRT) 334
9.3.3 Pengembangan Jalur Sepeda dan Pedestrian 335
9.4 Penataan Permukiman Kumuh dan Perumahan Rakyat ... 337
9.4.1 Strategi Relokasi vs Revitalisasi Kawasan Kumuh .. 338
9.4.2 Penyediaan Rumah Susun dan Hunian Layak 340
9.4.3 Kebijakan Lahan dan Perizinan Perumahan 341
9.5 Aspek Lingkungan dan Mitigasi Bencana Perkotaan 343
9.5.1 Pengelolaan Sampah Berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R) 344
9.5.2 Perencanaan Drainase Kota dan Pengendalian Banjir 345
9.5.3 Mitigasi Bencana Gempa Bumi dan Kebakaran..... 346
KESIMPULAN 348
BAB 10: PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITAS KOTA..... 351
PENDAHULUAN 351
10.1 Perencanaan Sistem Jaringan Jalan dan Aksesibilitas ... 354

10.1.1 Klasifikasi Jaringan Jalan (Primer, Sekunder, Lokal) 355
10.1.2 Manajemen Lalu Lintas dan Analisis Kinerja Jalan 357
10.1.3 Pembangunan Jembatan dan Flyover 359
10.1.4 Sistem Manajemen Perkerasan Jalan 360
10.1.5 Keselamatan Jalan dan Audit 361
10.1.6 Teknik Rekayasa Penenang Lalu Lintas (Traffic Calming) 362
10.1.7 Skema Pembiayaan Infrastruktur Jalan 363
10.1.8 Integrasi dengan Angkutan Umum 364
10.1.9 Sistem Transportasi Cerdas (ITS) 365
10.1.10 Peran Jalan sebagai Ruang Publik.....366
10.2 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perkotaan 367
10.2.1 Sumber Air Baku dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) 368
10.2.2 Jaringan Pipa Distribusi dan Pelayanan 369
10.2.3 Regulasi Tarif dan Keberlanjutan SPAM.....370
10.2.4 Manajemen Kehilangan Air (Non-Revenue Water - NRW).....372
10.2.5 Pemantauan Kualitas Air dan Perlindungan Sumber 373
10.2.6 Manajemen Permintaan Air (Water Demand Management) 374
10.2.7 SPAM Berbasis Komunitas di Pinggiran Kota 375
10.2.8 Ketahanan Air Perkotaan (Urban Water Resilience) 376

10.2.9 Pendanaan dan Model Bisnis PDAM 377
10.2.10 Pemanfaatan Teknologi Digital dalam SPAM 378
KESIMPULAN 379
BAB 11: PERENCANAAN SOSIAL DAN KEBUDAYAAN 381
PENDAHULUAN 381
11.1 Integrasi Aspek Sosial dalam Perencanaan Fisik 384
11.1.1 Analisis Dampak Sosial Lingkungan (ANDALALIN) 385
11.1.2 Pemberdayaan Masyarakat Lokal dalam Proyek Pembangunan 387
11.1.3 Penanganan Isu Penggusuran dan Relokasi 388
11.2 Perencanaan Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan 390
11.2.1 Standar dan Sebaran Fasilitas Pendidikan 391
11.2.2 Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan Primer dan Sekunder 393
11.2.3 Perencanaan Ruang Publik yang Inklusif 394
11.3 Pelestarian Cagar Budaya dan Ruang Sejarah Kota 395
11.3.1 Inventarisasi dan Zonasi Kawasan Cagar Budaya .. 397
11.3.2 Kebijakan Insentif dan Disinsentif Pelestarian Bangunan Tua 398
11.3.3 Pemanfaatan Cagar Budaya untuk Pariwisata 400
KESIMPULAN 401
BAB 12: KETERKAITAN PERDESAAN-PERKOTAAN. 404
(R-U LINKAGES) 404

PENDAHULUAN....404
12.1 Konsep Keterkaitan Fungsional Desa-Kota....407
12.1.1 Definisi dan Manfaat Keterkaitan Desa-Kota 408
12.1.2 Aliran Barang dan Jasa Antar-wilayah....410
12.1.3 Aliran Migrasi dan Tenaga Kerja....411
12.2 Peran Kota sebagai Pusat Pelayanan Bagi Desa....413
12.2.1 Kota sebagai Pusat Pasar dan Distribusi Hasil Pertanian 414
12.2.2 Kota sebagai Pusat Pendidikan dan Kesehatan Lanjutan 415
12.2.3 Kota sebagai Pusat Birokrasi dan Keuangan....416
12.3 Dampak Pembangunan Kota terhadap Lingkungan Desa 418
12.3.1 Ekspansi Permukiman Kota ke Wilayah Pinggiran 419
12.3.2 Dampak Pencemaran Kota terhadap Sumber Daya Desa 420
12.3.3 Konflik Penggunaan Lahan (Urban Sprawl) 421
12.4 Perencanaan Kawasan Aglomerasi dan Metropolitan 422
12.4.1 Definisi Kawasan Metropolitan dan Aglomerasi 423
12.4.2 Isu Koordinasi Antar-Daerah dalam Kawasan Metropolitan....425
12.4.3 Pembentukan Badan Kerja Sama Pembangunan Kawasan....426
KESIMPULAN 427
BAB 13: PEMBANGUNAN BERBASIS KOMUNITAS DAN LOKAL 430

PENDAHULUAN 430

13.1 Konsep Pembangunan Berbasis Komunitas (Community Based Development)..... 433

13.1.1 Prinsip Bottom-Up Planning 434

13.1.2 Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Pembangunan 436

13.1.3 Pemberdayaan dan Transfer Kontrol ke Komunitas438

13.2 Peran Lembaga Adat dan Kearifan Lokal..... 439

13.2.1 Peran Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 441

13.2.2 Integrasi Nilai Lokal dalam Perencanaan Tata Ruang 442

13.2.3 Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat..... 444

13.3 Penerapan Participatory Rural Appraisal (PRA) 445

13.3.1 Teknik Pemetaan Partisipatif..... 446

13.3.2 Teknik Wawancara Mendalam Kelompok (FGD).. 448

13.3.3 Analisis Masalah dan Potensi Secara Bersama 449

KESIMPULAN 451

BAB 14: KEUANGAN PUBLIK DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN 453

PENDAHULUAN 453

14.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah (APBD)..... 456

14.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... 457

14.1.2 Dana Transfer dari Pemerintah Pusat 459

14.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 461

14.1.4 Potensi dan Tantangan Peningkatan PAD 463
14.1.5 Dinamika Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) 465
14.1.6 Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan 466
14.1.7 Retribusi Daerah: Jenis dan Problematika Pemungutan 467
14.1.8 Pajak Daerah: Optimalisasi dan Ekstensifikasi 468
14.1.9 Peran Pinjaman Daerah dalam Struktur Pendapatan 469
14.1.10 Hibah dan Sumber Pendapatan Insidental Lainnya 471
KESIMPULAN 472
BAB 15: INDIKATOR DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN 474
PENDAHULUAN.....474
15.1 Indikator Kinerja Makro Pembangunan 477
15.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 478
15.1.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 480
15.1.3 Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran.....481
15.2 Evaluasi Kinerja Perencanaan Berbasis Logika (Logic Model) 483
15.2.1 Perumusan Hasil (Outcome) dan Dampak (Impact)484
15.2.2 Pengukuran Indikator Output dan Input 486
15.2.3 Keterkaitan Program dengan Tujuan Strategis.....487
15.3 Monitoring dan Evaluasi Partisipatif.....489

15.3.1 Mekanisme Pelibatan Masyarakat dalam Pengawasan Proyek 490

15.3.2 Survei Kepuasan Pelayanan Publik 491

15.3.3 Penggunaan Data dan Umpan Balik dari Komunitas 492

KESIMPULAN 494

BAB 16: ISU-ISU KONTEMPORER DALAM PERENCANAAN 496

PENDAHULUAN 496

16.1 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon dan Iklim . 499

16.1.1 Strategi Mitigasi Perubahan Iklim di Perdesaan dan Perkotaan 500

16.1.2 Perencanaan Adaptasi (Ketahanan Pangan dan Air) 502

16.1.3 Kebijakan Energi Terbarukan dan Transportasi Hijau 503

16.2 Perencanaan Inklusif dan Sensitif Gender 505

16.2.1 Analisis Gender dalam Pengambilan Keputusan Perencanaan 506

16.2.2 Perencanaan Ruang yang Aman bagi Perempuan dan Anak 507

16.2.3 Penyediaan Fasilitas Publik yang Responsif Gender 509

16.3 Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital 510

16.3.1 Identifikasi Potensi Sektor Ekonomi Kreatif 512

16.3.2 Pembangunan Infrastruktur Digital dan Ekosistem Start-up 513

16.3.3 Peran Creative Hub dan Ruang Kolaborasi.....514
16.4 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) 515
16.4.1 Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas 517
16.4.2 Pemberantasan Korupsi dalam Proses Perencanaan518
16.4.3 Pemanfaatan E-Government untuk Pelayanan Publik 520
16.5 Konsep Kota Tangguh (Resilience City).....521
16.5.1 Aspek Ketahanan Sosial dan Ekonomi 522
16.5.2 Aspek Ketahanan Infrastruktur dan Lingkungan 523
16.5.3 Strategi Pengelolaan Risiko Bencana Terpadu 524
KESIMPULAN 525
BAB 17: STUDI KASUS DAN BEST PRACTICE PERENCANAAN.....528
PENDAHULUAN.....528
17.1 Studi Kasus Perencanaan Kota Metropolitan di Indonesia 531
17.1.1 Kasus Jakarta (Jabodetabek) dan Permasalahan Urban Sprawl 532
17.1.2 Kasus Surabaya dan Inovasi Pelayanan Publik 534
17.1.3 Kasus Kota Baru di Indonesia (Misalnya, IKN) 536
17.2 Studi Kasus Perencanaan Pembangunan Desa Unggulan 538
17.2.1 Kasus Desa Mandiri dan Berdikari 539
17.2.2 Kasus Desa Wisata (Keberhasilan dan Kegagalan).541

17.2.3 Kasus Desa dengan Pengelolaan BUMDes Terbaik542

17.3 Studi Kasus Keberhasilan Perencanaan di Negara Berkembang 544

17.3.1 Model Perencanaan Inklusif di India atau Afrika ... 545

17.3.2 Keberhasilan Pembangunan Infrastruktur di Asia Tenggara 547

17.3.3 Perencanaan Transportasi Publik di Amerika Latin 548

KESIMPULAN 549

BAB 18: KESIMPULAN DAN ARAH KEBIJAKAN MASA DEPAN 552

PENDAHULUAN 552

18.1 Ringkasan Konsep Kunci dalam Perencanaan Pembangunan 555

18.1.1 Peran Perencanaan dalam Mencapai Tujuan Nasional 556

18.1.2 Sintesis Prinsip Perencanaan Perdesaan dan Perkotaan 557

18.1.3 Tantangan Utama Implementasi Rencana di Indonesia 558

18.2 Implikasi Perencanaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat 559

18.2.1 Peningkatan Kualitas Hidup melalui Infrastruktur dan Layanan 561

18.2.2 Kontribusi Perencanaan terhadap Penciptaan Lapangan Kerja 562

18.2.3 Pengurangan Kesenjangan Antar-Wilayah 563

18.3 Arah Kebijakan Perencanaan di Era Otonomi Daerah ... 564

18.3.1 Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perencanaan 565
18.3.2 Peningkatan Kapasitas SDM Perencana di Daerah 566
18.3.3 Dorongan Inovasi dan Adaptasi Teknologi 567
18.4 Rekomendasi Penelitian Lanjutan 568
18.4.1 Kebutuhan Riset di Bidang Tata Ruang Digital 568
18.4.2 Penelitian tentang Dampak Perubahan Iklim terhadap Pembangunan 569
18.4.3 Kajian tentang Efektivitas Model Kemitraan Desa-Kota 570
18.5 Visi Perencanaan Pembangunan Indonesia Emas 570
18.5.1 Pembangunan yang Inklusif dan Merata 571
18.5.2 Pembangunan yang Berketahanan dan Berkelanjutan 571
18.5.3 Pembangunan yang Berbasis Inovasi dan Teknologi 572
KESIMPULAN 573
GLOSSARY 575
DAFTAR PUSTAKA 581

BAB 1: KONSEP DASAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH

PENDAHULUAN

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa sebuah kota dapat berkembang menjadi pusat ekonomi yang dinamis, sementara wilayah lain di sekitarnya justru mengalami stagnasi? Atau mengapa beberapa desa berhasil mentransformasi potensinya menjadi sumber kesejahteraan, sedangkan desa lainnya terus terperangkap dalam lingkaran kemiskinan? Jawaban atas fenomena-fenomena tersebut sering kali bermuara pada satu kata kunci fundamental, yaitu perencanaan. Perencanaan pembangunan wilayah bukanlah sekadar aktivitas teknis penyusunan dokumen, melainkan sebuah proses intelektual, sosial, dan politis yang secara sadar mengarahkan perubahan menuju kondisi masa depan yang lebih baik. Tanpa perencanaan, pembangunan akan berjalan tanpa arah, reaktif, dan rentan terhadap kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan kolektif masyarakat.

Memasuki gerbang pemahaman ilmu perencanaan wilayah menuntut adanya dekonstruksi terhadap pandangan umum yang sering kali menyederhanakan perencanaan sebagai kegiatan pembuatan peta atau alokasi anggaran semata.

Secara esensial, perencanaan merupakan upaya sistematis untuk menjembatani antara kondisi saat ini dengan visi masa depan yang dicita-citakan. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan, mulai dari identifikasi masalah dan potensi, perumusan tujuan dan sasaran yang terukur, pemilihan alternatif strategi yang paling efektif dan efisien, hingga penetapan mekanisme implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Proses ini bersifat siklikal dan berkelanjutan, bukan linear dan berhenti pada satu titik.

Bab ini dirancang sebagai fondasi konseptual bagi keseluruhan isi buku. Pembahasan akan dimulai dengan menelusuri definisi dan filosofi yang melandasi praktik perencanaan pembangunan, membedakannya secara tegas dari konsep program dan proyek yang lebih operasional. Pemahaman yang kokoh terhadap hakikat perencanaan ini menjadi krusial sebelum melangkah lebih jauh ke dalam aspek-aspek yang lebih teknis. Dengan memahami filosofi dasarnya, seorang perencana dapat mengembangkan visi yang lebih jauh melampaui sekadar pemenuhan target-target jangka pendek.

Selanjutnya, bab ini akan membawa pembaca menelusuri jejak evolusi historis dari disiplin perencanaan wilayah. Konsep-konsep yang saat ini dianggap mapan sesungguhnya merupakan hasil dari proses panjang dialektika pemikiran

dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Memahami bagaimana teori-teori perencanaan dari konteks Barat diadopsi dan dikontekstualisasikan di Indonesia memberikan perspektif kritis mengenai relevansi dan tantangan implementasinya. Sejarah ini mengajarkan bahwa tidak ada satu pun model perencanaan yang cocok untuk semua kondisi (*one-size-fits-all*).

Dimensi-dimensi pembangunan yang menjadi fokus perencanaan juga akan dibedah secara mendalam. Pembangunan wilayah modern tidak lagi dapat dilihat hanya dari kacamata pertumbuhan ekonomi. Aspek sosial-budaya dan keberlanjutan lingkungan merupakan dua pilar lain yang sama pentingnya dan tidak dapat dinegasikan. Keseimbangan antara ketiga dimensi inilah yang menjadi inti dari paradigma pembangunan berkelanjutan, sebuah konsep yang akan terus diacu dalam bab-bab selanjutnya.

Ruang lingkup dan skala perencanaan menjadi aspek penting lainnya yang akan diuraikan. Perencanaan terjadi dalam sebuah hierarki yang saling terkait, mulai dari skala makro di tingkat nasional, skala meso di tingkat kabupaten/kota, hingga skala mikro di unit pemerintahan terkecil seperti desa. Memahami interkoneksi antar-skala ini adalah kunci untuk menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih kebijakan yang kontraproduktif.

Sebagai penutup, bab ini akan menguraikan landasan yuridis yang menjadi payung hukum bagi seluruh aktivitas perencanaan pembangunan di Indonesia. Pengenalan terhadap Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan regulasi terkait penataan ruang menjadi bekal wajib bagi setiap calon perencana atau praktisi pembangunan. Kerangka hukum ini memberikan legitimasi sekaligus batasan bagi proses perencanaan agar sejalan dengan amanat konstitusi dan tujuan bernegara.

Melalui penelusuran berbagai konsep dasar ini, pembaca diharapkan dapat membangun kerangka berpikir yang solid mengenai apa itu perencanaan pembangunan wilayah. Pemahaman fundamental ini akan menjadi kompas yang memandu pembaca dalam menjelajahi topik-topik yang lebih kompleks dan spesifik pada bab-bab berikutnya, mulai dari teori-teori pertumbuhan, metodologi analisis, hingga perencanaan sektoral di perdesaan dan perkotaan.

1.1 Definisi dan Filosofi Perencanaan Pembangunan

Setiap intervensi yang bertujuan mengubah kondisi suatu wilayah menjadi lebih baik memerlukan sebuah rancangan yang matang. Upaya sadar untuk merumuskan masa depan secara sistematis inilah yang menjadi inti dari perencanaan

pembangunan. Subbab ini akan membedah secara mendalam pengertian fundamental dari perencanaan pembangunan, filosofi yang mendasarinya, serta perbedaannya dengan instrumen kebijakan lain seperti program dan proyek. Pemahaman yang jernih terhadap konsep-konsep dasar ini akan menghindarkan perencana dari jebakan praktik yang bersifat teknokratis semata dan mendorongnya untuk berpikir lebih strategis dan visioner.

Analogi/Contoh Kasus: Perencanaan pembangunan dapat diibaratkan seperti seorang nakhoda yang memimpin sebuah kapal pesiar besar melintasi samudra. Nakhoda tersebut tidak hanya bertugas memutar kemudi (proyek), tetapi ia harus memiliki peta navigasi yang jelas (rencana), memahami tujuan akhir perjalanan (visi pembangunan), mengetahui rute-rute alternatif (strategi), serta mampu membaca kondisi cuaca dan arus laut (analisis lingkungan eksternal). Ia juga harus memastikan seluruh awak kapal, mulai dari teknisi mesin hingga juru masak, bekerja secara sinergis (koordinasi program). Tanpa peta dan tujuan yang jelas, kapal tersebut mungkin tetap bergerak, namun gerakannya hanya berputar-putar tanpa arah, menghabiskan bahan bakar secara sia-sia, dan tidak akan pernah sampai ke destinasi yang dicita-citakan.

1.1.1 Pengertian Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pada hakikatnya adalah sebuah proses pengambilan keputusan yang berorientasi ke masa depan (Conyers & Hills, 1984). Ini adalah upaya sadar dan terorganisir untuk memilih alternatif terbaik dari sejumlah pilihan yang tersedia guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembangunan, perencanaan didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan mengenai cara-cara alternatif dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Todaro & Smith, 2020). Definisi ini mengandung beberapa elemen kunci: proses, pilihan, sumber daya terbatas, dan tujuan.

Elemen "proses" menekankan bahwa perencanaan bukanlah sebuah produk statis, melainkan serangkaian tindakan yang dinamis dan berkesinambungan. Sebuah dokumen rencana hanyalah salah satu artefak dari proses yang jauh lebih besar, yang mencakup dialog, negosiasi, analisis, dan pembelajaran. Proses ini bersifat siklikal, di mana hasil dari evaluasi implementasi rencana akan menjadi masukan untuk siklus perencanaan berikutnya. Sifat dinamis ini memungkinkan adanya adaptasi terhadap perubahan kondisi yang tidak terduga.

Elemen "pilihan" menggarisbawahi bahwa inti dari perencanaan adalah pengambilan keputusan. Perencana dihadapkan pada berbagai kemungkinan masa depan dan beragam cara untuk mencapainya. Tugasnya adalah menganalisis setiap alternatif secara cermat, mempertimbangkan konsekuensi positif dan negatifnya, dan merekomendasikan jalur yang paling optimal. Hal ini membedakan perencanaan dari sekadar prediksi atau proyeksi, yang hanya menggambarkan apa yang kemungkinan akan terjadi tanpa adanya intervensi sadar untuk mengubahnya.

Selanjutnya, elemen "sumber daya terbatas" menjadi alasan fundamental mengapa perencanaan diperlukan. Sumber daya yang dimaksud mencakup modal finansial, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan waktu. Karena kelangkaan ini, alokasi sumber daya harus dilakukan secara efisien dan efektif agar dapat memberikan dampak maksimal bagi pencapaian tujuan pembangunan (Firman, 2019). Tanpa perencanaan, alokasi sumber daya cenderung bersifat acak, tumpang tindih, dan tidak produktif.

Elemen "tujuan" menegaskan bahwa perencanaan harus memiliki arah yang jelas. Tujuan-tujuan ini merupakan representasi dari aspirasi kolektif masyarakat mengenai kondisi masa depan yang diinginkan, seperti peningkatan

pendapatan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, atau kelestarian lingkungan. Tujuan ini harus dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* - SMART) agar dapat menjadi panduan yang efektif bagi implementasi.

Secara sintesis, perencanaan pembangunan dapat dipahami sebagai jembatan intelektual dan prosedural yang menghubungkan analisis kondisi saat ini dengan perumusan visi masa depan. Ini adalah alat untuk mengelola perubahan secara proaktif, bukan sekadar bereaksi terhadapnya. Dalam konteks Indonesia, proses ini dilembagakan melalui Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk memastikan adanya keterpaduan dan sinergi antara perencanaan di tingkat pusat dan daerah, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Bappenas, 2017).

Kompleksitas perencanaan pembangunan juga terletak pada sifatnya yang multi-disiplin. Praktik ini meminjam konsep dan metode dari berbagai bidang ilmu, seperti ekonomi, sosiologi, geografi, teknik, ilmu politik, dan manajemen. Seorang perencana dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir holistik, mampu mengintegrasikan berbagai perspektif yang terkadang saling bertentangan untuk

menghasilkan sebuah rencana yang komprehensif dan dapat diimplementasikan (Healey, 1997).

Pada akhirnya, pengertian perencanaan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari konteks nilai dan kekuasaan. Keputusan-keputusan dalam perencanaan selalu merefleksikan nilai-nilai tertentu dan dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan di antara para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perencanaan yang baik haruslah transparan, partisipatif, dan akuntabel, memastikan bahwa proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik luas. Ini sejalan dengan pergeseran paradigma dari perencanaan yang bersifat teknokratis murni menjadi perencanaan yang lebih komunikatif dan kolaboratif (Innes, 1995).

1.1.2 Filosofi dan Tujuan Jangka Panjang Pembangunan

Di balik setiap kegiatan teknis perencanaan, terdapat serangkaian keyakinan dasar atau filosofi yang menjadi landasan pemikirannya. Filosofi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental: "pembangunan untuk siapa?", "pembangunan untuk apa?", dan "bagaimana cara terbaik mencapainya?". Tanpa pemahaman filosofis yang mendalam, perencanaan berisiko menjadi aktivitas tanpa jiwa yang hanya berfokus pada angka dan target, namun gagal menyentuh esensi kesejahteraan manusia. Filosofi ini

yang pada akhirnya membentuk visi dan tujuan jangka panjang dari seluruh upaya pembangunan.

Salah satu filosofi dasar yang paling berpengaruh adalah pembangunan yang berpusat pada manusia (*people-centered development*). Pendekatan ini, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Amartya Sen dengan konsep kapabilitasnya, menyatakan bahwa tujuan akhir pembangunan bukanlah sekadar meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Tujuan sejatinya adalah memperluas kebebasan dan pilihan-pilihan nyata yang dimiliki oleh individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai (Sen, 1999). Peningkatan pendapatan hanyalah salah satu sarana, bukan tujuan itu sendiri. Dengan demikian, perencanaan harus berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, partisipasi politik, dan hak-hak dasar lainnya.

Filosofi kedua yang menjadi arus utama global adalah pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep ini, yang didefinisikan secara klasik oleh Komisi Brundtland, menekankan bahwa pembangunan harus memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (WCED, 1987). Filosofi ini menuntut adanya keseimbangan antara tiga pilar: pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan

lingkungan. Perencanaan tidak boleh lagi hanya mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan kelestarian ekologis atau menciptakan ketimpangan sosial yang semakin lebar.

Tujuan jangka panjang pembangunan yang diturunkan dari filosofi-filosofi ini bersifat multi-dimensi. Secara umum, tujuan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, tujuan ekonomi, yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, penciptaan lapangan kerja yang layak, peningkatan produktivitas, dan stabilitas ekonomi makro. Pertumbuhan ini harus bersifat inklusif, artinya manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir elite.

Kedua, tujuan sosial, yang meliputi pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pengurangan ketimpangan pendapatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, serta penguatan kohesi sosial dan modal sosial. Tujuan ini juga mencakup pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan penghormatan terhadap keragaman. Perencanaan harus mampu menciptakan masyarakat yang adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang. Konsep keterkaitan desa-kota menjadi krusial dalam mencapai pemerataan ini (Fang, 2022).

Ketiga, tujuan lingkungan, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengendalian polusi, konservasi keanekaragaman hayati, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Tujuan ini memastikan bahwa basis ekologis yang menopang kehidupan dan ekonomi tidak rusak. Perencanaan harus mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam setiap keputusan pembangunan, mulai dari tata ruang hingga pengembangan industri.

Dalam konteks Indonesia, filosofi dan tujuan jangka panjang pembangunan ini secara eksplisit termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Visi pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan jangka panjang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang menjadi acuan bagi perencanaan di tingkat yang lebih rendah.

Merumuskan tujuan jangka panjang ini merupakan sebuah proses politis yang melibatkan deliberasi publik. Peran perencana adalah memfasilitasi proses ini, menyediakan analisis dan data yang objektif, serta membantu merumuskan tujuan-tujuan tersebut ke dalam kerangka kerja yang

operasional dan dapat diukur pencapaiannya. Dengan demikian, perencanaan menjadi instrumen untuk menerjemahkan cita-cita filosofis bangsa menjadi kenyataan yang konkret dan terukur.

1.1.3 Perbedaan antara Perencanaan, Program, dan Proyek

Dalam percakapan sehari-hari maupun dalam dokumen-dokumen resmi, istilah "perencanaan," "program," dan "proyek" sering digunakan secara tumpang tindih. Padahal, ketiganya merujuk pada tingkatan yang berbeda dalam hierarki intervensi pembangunan. Memahami perbedaan konseptual yang tegas di antara ketiganya adalah esensial untuk menyusun sebuah kerangka kerja pembangunan yang logis, koheren, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Kekeliruan dalam memahami hierarki ini dapat menyebabkan inefisiensi dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Perencanaan (*planning*) menempati level tertinggi dalam hierarki ini. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, perencanaan adalah proses strategis yang menetapkan visi, tujuan, dan arah kebijakan jangka panjang. Output dari perencanaan adalah sebuah "rencana" (misalnya, Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah). Dokumen rencana ini bersifat komprehensif, mencakup berbagai sektor, dan memberikan kerangka kerja umum. Fokusnya adalah pada "apa" yang ingin dicapai dan "mengapa" hal itu penting, dengan memberikan arahan strategis yang luas (Rondinelli, 1993).

Di bawah level perencanaan, terdapat program (*program*). Sebuah program adalah sekumpulan proyek yang saling terkait dan dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan strategis yang lebih besar yang telah ditetapkan dalam rencana. Program memiliki cakupan yang lebih spesifik daripada rencana, namun lebih luas daripada proyek. Misalnya, jika sebuah rencana pembangunan daerah memiliki tujuan strategis "meningkatkan kualitas sumber daya manusia," maka salah satu programnya bisa jadi adalah "Program Wajib Belajar 12 Tahun." Program ini memiliki jangka waktu menengah dan mengoordinasikan berbagai proyek di bawahnya (Project Management Institute, 2017).

Program berfokus pada pencapaian *outcome* atau hasil. *Outcome* adalah perubahan atau manfaat yang diterima oleh target populasi sebagai akibat dari serangkaian intervensi. Dalam contoh "Program Wajib Belajar 12 Tahun," *outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dan menurunnya angka putus sekolah. Manajemen program bertugas memastikan

bahwa kumpulan proyek di bawahnya secara kolektif menghasilkan *outcome* yang diinginkan.

Pada level paling operasional, terdapat proyek (*project*). Proyek adalah upaya sementara (*temporary endeavor*) yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik (Project Management Institute, 2017). Setiap proyek memiliki titik awal dan akhir yang jelas, anggaran yang spesifik, serta lingkup pekerjaan yang terdefinisi dengan baik. Proyek berfokus pada penghantaran *output* atau keluaran. *Output* adalah produk atau layanan konkret yang dihasilkan oleh kegiatan proyek.

Melanjutkan contoh sebelumnya, di bawah "Program Wajib Belajar 12 Tahun," bisa terdapat beberapa proyek, seperti: "Proyek Pembangunan 10 Unit Sekolah Baru," "Proyek Pelatihan 500 Guru," dan "Proyek Pengadaan Buku Pelajaran untuk 20.000 Siswa." *Output* dari proyek pertama adalah 10 gedung sekolah yang siap digunakan. *Output* dari proyek kedua adalah 500 guru yang telah terlatih. Gabungan dari *output-output* proyek inilah yang diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian *outcome* program.

Secara ringkas, hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut: rencana memberikan arah strategis, program menerjemahkan strategi tersebut ke dalam serangkaian tindakan terkoordinasi untuk mencapai hasil, dan proyek

melaksanakan tindakan-tindakan spesifik untuk menghasilkan keluaran yang konkret. Rencana bersifat jangka panjang dan visioner, program bersifat jangka menengah dan berorientasi pada hasil, sementara proyek bersifat jangka pendek dan berorientasi pada keluaran.

Kegagalan dalam membedakan ketiganya sering kali berujung pada "proyek-itis," yaitu kondisi di mana pemerintah atau organisasi hanya fokus pada pelaksanaan proyek-proyek individual yang terfragmentasi tanpa adanya kerangka program yang jelas atau keterkaitan dengan tujuan strategis dalam rencana. Akibatnya, banyak proyek berhasil diselesaikan (*output* tercapai), namun tidak memberikan dampak atau manfaat yang signifikan bagi masyarakat (*outcome* tidak tercapai). Pemahaman yang benar terhadap hierarki ini memungkinkan perencana untuk membangun sebuah rantai hasil (*results chain*) yang logis dari proyek ke program hingga ke tujuan rencana.

1.2 Evolusi dan Sejarah Perencanaan Wilayah

Disiplin perencanaan wilayah yang kita kenal saat ini bukanlah sebuah entitas yang muncul secara tiba-tiba. Ia merupakan produk dari evolusi pemikiran yang panjang, dibentuk oleh berbagai krisis sosial, ekonomi, dan lingkungan sepanjang sejarah. Melacak jejak perkembangan

ini memberikan wawasan berharga tentang mengapa pendekatan-pendekatan tertentu muncul, bagaimana mereka beradaptasi, dan pelajaran apa yang bisa dipetik untuk praktik perencanaan masa kini. Subbab ini akan mengulas sejarah perkembangan konsep *regional planning*, perannya dalam era pembangunan nasional, serta proses kontekstualisasi teori-teori tersebut di Indonesia.

Analogi/Contoh Kasus: Evolusi teori perencanaan wilayah dapat diibaratkan seperti perkembangan ilmu kedokteran. Pada awalnya, praktik "pengobatan" wilayah bersifat reaktif dan parsial, mirip dengan pengobatan tradisional yang fokus pada gejala (misalnya, membangun perumahan baru untuk mengatasi kekumuhan tanpa menyentuh akar masalah kemiskinan). Seiring waktu, pemahaman tentang "anatomi" dan "fisiologi" sebuah wilayah berkembang. Para perencana mulai memahami hubungan kompleks antar "organ" (sektor ekonomi, infrastruktur, sosial) dan mengembangkan pendekatan yang lebih sistemik, seperti dokter modern yang melakukan diagnosis menyeluruh sebelum memberikan resep. Era perencanaan berkelanjutan saat ini bisa dianalogikan dengan pendekatan medis holistik yang tidak hanya mengobati penyakit, tetapi juga mempromosikan gaya hidup sehat dan pencegahan (*preventive care*) untuk kesejahteraan jangka panjang.

1.2.1 Sejarah Perkembangan Konsep Regional Planning

Akar dari perencanaan wilayah modern dapat ditelusuri kembali ke akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Eropa dan Amerika Utara. Kemunculannya dipicu oleh dampak negatif Revolusi Industri, yang menciptakan kota-kota padat, kumuh, dengan kondisi sanitasi yang buruk dan eksploitasi buruh yang masif. Perencanaan pada era ini lahir dari gerakan reformasi sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup di perkotaan. Salah satu pionir awal adalah Ebenezer Howard dengan konsep "Kota Taman" (*Garden City*) pada tahun 1898, yang mengusulkan penciptaan kota-kota baru yang mandiri untuk menyeimbangkan keunggulan kehidupan kota dan desa (Hall, 2014).

Konsep perencanaan kemudian berkembang dari skala kota ke skala yang lebih luas, yaitu region atau wilayah. Para pemikir seperti Patrick Geddes, seorang ahli biologi Skotlandia, berpendapat bahwa perencanaan harus dimulai dari survei komprehensif terhadap suatu wilayah, mencakup geografi, ekonomi, dan budaya, untuk memahami hubungan timbal balik antara "tempat, pekerjaan, dan masyarakat" (*place, work, and folk*). Pendekatan "survei sebelum rencana" ini menjadi salah satu pilar metodologis dalam perencanaan wilayah modern (Geddes, 1915).

Perkembangan signifikan terjadi pada dekade 1920-an dan 1930-an, terutama di Amerika Serikat. Krisis Depresi Hebat mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi skala besar dalam perekonomian. Proyek *Tennessee Valley Authority* (TVA) yang diluncurkan pada tahun 1933 sering dianggap sebagai contoh klasik pertama dari *regional planning* yang komprehensif. TVA tidak hanya membangun bendungan untuk pengendalian banjir dan pembangkit listrik, tetapi juga mengelola program reboisasi, pengembangan pertanian, dan pembangunan industri di seluruh daerah aliran sungai Tennessee (Friedmann & Weaver, 1979).

Pasca Perang Dunia II, perencanaan wilayah menjadi instrumen penting bagi negara-negara di seluruh dunia untuk melakukan rekonstruksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Eropa, fokusnya adalah pada pembangunan kembali kota-kota yang hancur dan mengelola pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan regional. Di negara-negara berkembang yang baru merdeka, termasuk Indonesia, perencanaan diadopsi sebagai alat utama untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional, seperti industrialisasi dan modernisasi.

Pada dekade 1960-an dan 1970-an, muncul kritik terhadap pendekatan perencanaan yang dianggap terlalu teknokratis,

top-down, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata. Para kritikus, yang dipengaruhi oleh pemikiran advokasi dan partisipatif, berpendapat bahwa perencanaan telah mengabaikan suara kelompok-kelompok marginal dan dampak sosial negatif dari proyek-proyek pembangunan skala besar. Hal ini memunculkan pendekatan-pendekatan baru, seperti *advocacy planning* yang dipelopori oleh Paul Davidoff, yang mendorong perencana untuk bertindak sebagai pembela kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung (Davidoff, 1965).

Gelombang kritik selanjutnya datang dari para environmentalis pada dekade 1970-an dan 1980-an, yang menyoroti kegagalan perencanaan dalam memperhitungkan batas-batas ekologis. Kesadaran akan isu-isu seperti polusi, penipisan sumber daya alam, dan perubahan iklim mendorong lahirnya paradigma pembangunan berkelanjutan. Sejak saat itu, perencanaan wilayah modern dituntut untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan secara fundamental ke dalam prosesnya, bukan lagi sebagai tambahan atau renungan (Beatley, 2000).

Di era kontemporer, perencanaan wilayah dihadapkan pada tantangan-tantangan baru seperti globalisasi, urbanisasi masif, kemajuan teknologi digital, dan peningkatan frekuensi bencana alam. Konsep-konsep seperti kota cerdas

(*smart city*), kota tangguh (*resilient city*), dan ekonomi hijau (*green economy*) menjadi diskursus utama yang membentuk praktik perencanaan saat ini. Sejarah ini menunjukkan bahwa perencanaan wilayah adalah disiplin yang terus berevolusi, secara konstan beradaptasi untuk merespons permasalahan-permasalahan paling mendesak pada zamannya. Pemahaman akan evolusi ini penting untuk menempatkan teori dan praktik saat ini dalam perspektif yang lebih luas.

1.2.2 Era Pembangunan Nasional dan Peran Pemerintah

Setelah meraih kemerdekaan, banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, mengadopsi model pembangunan yang sangat sentralistik. Dalam konteks Perang Dingin dan persaingan ideologi, negara dipandang sebagai aktor utama yang paling mampu memobilisasi sumber daya dan mengarahkan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Era ini ditandai oleh dominasi perencanaan komprehensif dari atas ke bawah (*top-down comprehensive planning*), di mana pemerintah pusat memainkan peran yang sangat dominan dalam setiap aspek pembangunan.

Di Indonesia, era ini secara formal dimulai dengan diperkenalkannya Pola Pembangunan Nasional Semesta

Berencana pada tahun 1961. Namun, implementasi yang lebih sistematis terjadi pada era Orde Baru melalui serangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada tahun 1969. Filosofi yang mendasari Repelita adalah "Trilogi Pembangunan," yang menekankan pada stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya (Hill, 1996). Fokus utama pada awalnya adalah pada stabilitas dan pertumbuhan, dengan asumsi bahwa manfaat pertumbuhan pada akhirnya akan menetes ke bawah (*trickle-down effect*) kepada seluruh lapisan masyarakat.

Peran pemerintah pusat pada masa ini sangat sentral. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi lembaga teknokratis yang sangat kuat, bertugas merumuskan target-target pembangunan nasional, mengalokasikan anggaran, dan menentukan proyek-proyek strategis. Perencanaan bersifat sektoral, dengan setiap kementerian dan lembaga membuat rencana untuk sektornya masing-masing. Koordinasi antar-sektor dan antar-wilayah menjadi tantangan utama, meskipun secara formal ada upaya untuk mensinergikannya melalui mekanisme konsultasi.

Pemerintah daerah pada era ini lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan dari pusat. Otonomi daerah sangat terbatas, dan sebagian besar keputusan penting terkait

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, M., et al. (2023). The construction of the new capital city (IKN) in Indonesia: A review of potential environmental and social impacts. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1180*(1), 012028.

ActionAid. (2004). *Women and the city: A handbook for conducting women's safety audits*. ActionAid.

Ahern, J. (2011). From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world. *Landscape and Urban Planning*, *100*(4), 341-343.

Afriyanie, D., Wilonoyudho, S., & Sari, D. P. (2020). The conflict of agricultural land conversion in peri-urban area of Semarang City, Indonesia. *Geographia Technica*, *15*(2), 1-13.

Afrizal, A., Mukhlis, M., & Hidayat, A. (2021). The political economy of village funds in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, *11*(2), 1-14.

Agba, M. S., Ocheni, S. I., & Nkpoyen, F. (2021). Capacity building and rural development in Nigeria: The role of community-based organizations. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, *V*(VI), 2454-6186.

Aldrich, D. P. (2012). *Building resilience: Social capital in post-disaster recovery*. University of Chicago Press.

American Planning Association. (2002). *Planning for Smart Growth: 2002 State of the States*. APA.

Anríquez, G., & Stamoulis, K. (2007). *Rural development and poverty reduction: Is agriculture still the key?*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village governance, community life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *52*(2), 161–183. https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1197943

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216-224.

Arsyad, L. (2022). The challenges of implementing performance-based budgeting in Indonesia's public sector. *Journal of Public Administration and Governance*, *12*(1), 123-140. https://doi.org/10.5296/jpag.v12i1.19456

Aspinall, E. (2021). The new nationalism and identity politics in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, *51*(5), 723-733.

Asian Development Bank (ADB). (2017). *Public-Private Partnership Monitor: Southeast Asia*. ADB.

Bachri, S. (2018). The urgency of village boundary determination in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, *29*(1), 1-13.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2012). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Konsep dan Definisi Produk Domestik Regional Bruto*. BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Klasifikasi Desa/Kelurahan di Indonesia 2020*. BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Potret Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Hasil Sensus Pertanian 2018*. BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022*. Berita Resmi Statistik BPS.

Bahri, A. (2012). *Integrated urban water management*. CRC Press.

Bappenas. (2017). *Modul Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah*. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

Bappenas. (2022). *Buku Saku Pemindahan IKN: Nusantara*. Kementerian PPN/Bappenas.

Barbier, E. B. (1987). The Concept of Sustainable Economic Development. *Environmental Conservation*, *14*(2), 101–110.

Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1992). Convergence. *Journal of Political Economy*, *100*(2), 223–251.

Baskara, I. G. B. (2021). The role of e-Musrenbang in enhancing transparency and public participation in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, *44*(13), 1119-1130. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1768846

Beatley, T. (2000). *Green Urbanism: Learning from European Cities*. Island Press.

Beavon, K. S. O. (1977). *Central Place Theory: A Reinterpretation*. Longman.

Beittinger-Lee, V. (2019). Does local participation in planning matter? A case study of rural community development in Indonesia. *Development in Practice*, *29*(4), 438-448.

Belin, M. Å., Tillgren, P., & Vedung, E. (2012). Vision Zero–a road safety policy innovation. *International Journal of Injury Control and Safety Promotion*, *19*(2), 171-179.

Berkes, F. (2017). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.

Berkes, F., Colding, J., & Folke, C. (2000). Rediscovery of traditional ecological knowledge as adaptive

management. *Ecological Applications*, *10*(5), 1251-1262.

Bivic, C., & Melot, R. (2020). Scheduling urbanization in rural municipalities: Local practices in land-use planning on the fringes of the Paris region. *Land Use Policy*, 99, 105040. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105040

Blakely, E. J., & Leigh, N. G. (2010). *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Bowen, R., & Webber, D. (2024). Do city region policies neglect rural areas?. *Journal of Rural Studies*. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103207

Brilliantes, A. B., & Montes, M. F. (2016). *Decentralization and subnational economies: The case of the Philippines*. Routledge.

Brodjonegoro, B. (2014). Intergovernmental fiscal relations in Indonesia: A historical perspective. In H. Hill (Ed.), *Regional dynamics in a decentralized Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

Brooks, D. B. (2006). An operational definition of water demand management. *Water Resources Development*, *22*(4), 521-528.

Brunner, R. D., et al. (2021). Adaptive governance for water and food security. *Water Security*, *13*, 100091.

Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (5th ed.). Jossey-Bass.

Burgess, E. W. (1925). The Growth of the City: An Introduction to a Research Project. In R. E. Park, E. W. Burgess, & R. D. McKenzie (Eds.), *The City* (pp. 47-62). University of Chicago Press.

Büthe, T., de Mello e Souza, A., & Major, S. (2012). The politics of private foreign aid: The role of domestic politics and development services in the distribution of private aid. *International Studies Quarterly*, *56*(2), 293-307.

Button, K. (2010). *Transport Economics* (3rd ed.). Edward Elgar Publishing.

Cahyadi, E. (2018). *Village fund, elite capture, and community participation in Indonesia*. SMERU Research Institute.

Calavita, N., & Mallach, A. (Eds.). (2010). *Inclusionary housing in international perspective: Affordable housing, social inclusion, and land value recapture*. Lincoln Institute of Land Policy.

Calder, I. R. (2005). *Blue revolution: Integrated land and water resource management*. Earthscan.

Calthorpe, P. (1993). *The next American metropolis: Ecology, community, and the American dream*. Princeton Architectural Press.

Cervero, R. (2013). Bus Rapid Transit (BRT): An efficient and competitive mode of public transport. *ITE Journal*, *83*(5), 32-37.

Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World Development*, *22*(7), 953-969.

Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.

Chapain, C., & Stryjakiewicz, T. (2017). *Creative industries in Europe: Drivers of new sectoral and spatial dynamics*. Springer.

Chen, K., Long, H., Liao, L., Tu, S., & Li, T. (2020). Land use transitions and urban-rural integrated development: Theoretical framework and China's evidence. *Land Use Policy*, 92, 104465. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104465

Chen, M., Zhou, Y., Huang, X., & Ye, C. (2021). The Integration of New-Type Urbanization and Rural Revitalization Strategies in China: Origin, Reality and Future Trends. *Land*. https://doi.org/10.3390/land10020207

Chen, Y., & Coulson, N. E. (2019). The economic base hypothesis: A new perspective from the geography of firm entry. *Journal of Regional Science*, *59*(5), 839–863. https://doi.org/10.1111/jors.12450

Christaller, W. (1966). *Central Places in Southern Germany* (C. W. Baskin, Trans.). Prentice-Hall. (Original work published 1933).

Colding, J., & Folke, C. (2001). Social taboos: "invisible" systems of local resource management and biological conservation. *Ecological Applications*, *11*(2), 584-600.

Colven, E. (2021). From eviction to co-production: The politics of urban knowledge in Jakarta, Indonesia. *Urban Studies*, *58*(15), 3125-3141.

Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley & Sons.

Corbett, J., Rambaldi, G., Kyem, P., Weiner, D., & Olson, R. (2006). Overview: Mapping for change, the emergence of a new practice. *Participatory Learning and Action*, *54*, 13-19.

Costanza, R., Kubiszewski, I., Giovannini, E., Lovins, H., McGlade, J., Pickett, K. E., ... & Wilkinson, R. (2014). Development: Time to leave GDP behind. *Nature*, *505*(7483), 283-285. https://doi.org/10.1038/505283a

Daily, G. C. (Ed.). (1997). *Nature's Services: Societal Dependence on Natural Ecosystems*. Island Press.

Daly, H. E., & Cobb, J. B. (1994). *For the Common Good: Redirecting the Economy toward Community, the Environment, and a Sustainable Future*. Beacon Press.

Dartanto, T., Moeis, F. R., & Otsubo, S. (2020). Does the village fund program improve village-level welfare? Evidence from Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, *37*(3), 296-318.

Davidoff, P. (1965). Advocacy and Pluralism in Planning. *Journal of the American Institute of Planners*, *31*(4), 331–338. https://doi.org/10.1080/01944366508978187

Devas, N. (1989). *Financing Local Government in Indonesia*. Ohio University Press.

Diputra, I. G. S., & Saputra, K. A. K. (2021). The effect of transparency and accountability on village fund management with community participation as a moderating variable. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, *5*(3), 320-329.

Dittmar, H., & Ohland, G. (Eds.). (2004). *The new transit town: Best practices in transit-oriented development*. Island Press.

Douglass, M. (2014). The urban-rural interface: A new planning and policy focus. *Environment and Urbanization ASIA*, *5*(1), 1-10.

Du Plessis, J. (2005). The growing problem of forced evictions and the need for a human rights-based response. *International Journal on Minority and Group Rights*, *12*(1), 1-28.

Dwiyanto, A., & Sumaryadi, I. (2018). The role of the regional inspectorate in supervising village fund management in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, *10*(1), 1-12.

Earthman, G. I. (2017). *Planning educational facilities: For the next century*. Rowman & Littlefield.

Ellis, F. (2000). *Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries*. Oxford University Press.

Esmara, H. (1986). *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Gramedia.

Esteves, A. M., Franks, D., & Vanclay, F. (2012). Social impact assessment: the state of the art. *Impact Assessment and Project Appraisal*, *30*(1), 34-42.

Ewing, R. (1999). *Traffic calming: State of the practice*. US Department of Transportation, Federal Highway Administration.

Fang, C. (2022). On integrated urban and rural development. *Journal of Geographical Sciences*, 32, 1411 - 1426. https://doi.org/10.1007/s11442-022-2003-8

Firdaus, R., et al. (2020). Heavy metal pollution of Citarum River tributaries in Bandung, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *412*(1), 012023.

Firman, T. (2009). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of Jakarta-Bandung Region (JBR) development. *Habitat International*, *33*(4), 327–339. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.005

Firman, T. (2017). The challenges of governing Indonesian mega-urban regions. *Planning Theory & Practice*, *18*(3), 473-477.

Firman, T. (2019). *Pembangunan Wilayah Berbasis Visi: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Firman, T., Surbakti, I. M., Idroes, I. C., & Simatupang, H. D. (2018). The dynamics of village development planning in the era of the Village Law in Indonesia. *Journal of Regional and City Planning*, *29*(2), 124-141.

Fitrani, F., Badrudin, R., & Muhsin, M. (2019). The effectiveness of village fund distribution in Indonesia. *International Journal of Financial Research*, *10*(5), 183-191.

Fletcher, T. D., Shuster, W., Hunt, W. F., Ashley, R., Butler, D., Arthur, S., ... & Mikkelsen, P. S. (2015). SUDS, LID, LUDS, WSUDS, sponges: What's in a name? Terminology of urban stormwater management. *Urban Water Journal*, *12*(1), 1-11.

Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. MIT Press.

Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.

Friedmann, J., & Douglass, M. (1978). Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia. In *Growth Pole Strategy and Regional Development Policy*. Pergamon Press.

Friedmann, J., & Weaver, C. (1979). *Territory and Function: The Evolution of Regional Planning*. University of California Press.

Gajić, A., Krunić, N., & Protić, B. (2021). Classification of Rural Areas in Serbia: Framework and Implications for Spatial Planning. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su13041596

Geddes, P. (1915). *Cities in Evolution: An Introduction to the Town Planning Movement and to the Study of Civics*. Williams & Norgate.

Gehl, J. (2011). *Life between buildings: Using public space*. Island Press.

Ghazinoory, S., Zadeh, A. E., & Memariani, A. (2011). A fuzzy SWOT analysis of a Saderat Bank's branch. *International Journal of Industrial Engineering & Production Research*, *22*(3), 175-184.

Gibson, J., & Woolcock, M. (2019). *The political economy of local governance in Indonesia: a review of the literature*. World Bank.

Gilbert, A. (2007). The return of the slum: Does language matter? *International Journal of Urban and Regional Research*, *31*(4), 697-713.

Glaeser, E. L. (2011). *Triumph of the city: How our greatest invention makes us richer, smarter, greener, healthier, and happier*. Penguin Press.

Gössling, S. (2020). Why cities need to take road transport decarbonization seriously. *Journal of Urban Climate*, *31*, 100563.

Gulliford, M., Figueroa-Munoz, J., Morgan, M., Hughes, D., Gibson, B., Beech, R., & Hudson, M. (2002). What does 'access to health care' mean?. *Journal of Health Services Research & Policy*, *7*(3), 186-188.

Gusmanov, R., Askarov, A., Lukyanova, M., Kovshov, V., & Stovba, E. (2020). Strategic Planning of Rural Development Based on Foresight Methodologies. *Scientifica*, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/5195104

Haas, R., Hudson, W. R., & Zaniewski, J. (1994). *Modern pavement management*. Krieger Publishing Company.

Hadiz, V. R. (2018). Islamic populism and the politics of development in Indonesia. *Development and Change*, *49*(5), 1247-1265. https://doi.org/10.1111/dech.12423

Hadiz, V. R., & Samba, A. N. (2021). The missing link in village development: The role of village facilitators in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, *38*(2), 200-216.

Halim, A., & Abdullah, S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Hall, P. (2014). *Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design Since 1880* (4th ed.). Wiley-Blackwell.

Hamilton, K., & Jenkins, L. (2000). *A gender audit for public transport: A new policy tool for the new millennium*. John Grooms.

Hansen, N. M. (1967). Development Pole Theory in a Regional Context. *Kyklos*, *20*(3), 709–727.

Harris, C. D., & Ullman, E. L. (1945). The Nature of Cities. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, *242*, 7-17.

Haynes, K. E., & Dinc, M. (1997). The Location Quotient: A View of 1,000 Faces. In *Techniques for Regional Analsysis*. University of Venice.

Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan.

Healey, P. (2012). The universal and the contingent: Some reflections on the transnational flow of planning ideas and practices. *Planning Theory & Practice*, *13*(2), 288-292.

Hidayat, A., & Setyawan, D. (2021). Urban transportation problems and policy in Indonesia: a review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *737*(1), 012030.

Hidayat, S., & Setyawan, D. (2021). From Vision to Action: The Challenges of Translating Long-Term Development Plans (RPJP) into Medium-Term Plans (RPJM) in Indonesian Local Governments. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, *13*(2), 225-238. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.225-238

Hidayatullah, A., et al. (2021). A review of rural electrification policies in Indonesia: From centralized to

decentralized approaches. *Energy for Sustainable Development*, *64*, 77-87.

Hill, H. (1996). *The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant*. Cambridge University Press.

Hill, T., & Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: It's time for a product recall. *Long Range Planning*, *30*(1), 46-52. https://doi.org/10.1016/S0024-6301(96)00095-7

Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press.

Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public–private partnerships: an international performance review. *Public Administration Review*, *67*(3), 545-558.

Hofman, B., & Kaiser, K. (2004). The Making of the Big Bang and Its Aftermath: A Political Economy Perspective. In *Decentralization and the Provision of Public Services: The Case of Indonesia*. World Bank.

Hoornweg, D., & Bhada-Tata, P. (2012). *What a waste: A global review of solid waste management*. World Bank.

Hoyt, H. (1939). *The Structure and Growth of Residential Neighborhoods in American Cities*. Federal Housing Administration.

Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2007). Peri-urbanisation in East Asia: A new challenge for planning and governance. *International Development Planning Review*, *29*(4), 503-519.

Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2013). Planning by opportunity: An analysis of post-decentralization planning practice in Indonesia. *Planning Practice & Research*, *28*(2), 161-179.

Hudalah, D., & Woltjer, J. (2014). The polycentric metropolis and the curse of centrality: A governance perspective on the Jakarta Metropolitan Area. *Journal of the American Planning Association*, *80*(3), 241-254.

Indonesia Corruption Watch (ICW). (2022). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. ICW.

Innes, J. E. (1995). Planning Theory's Emerging Paradigm: Communicative Action and Interactive Practice. *Journal of Planning Education and Research*,

14(3), 183–189. https://doi.org/10.1177/0739456X9501400307

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2022). *Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the IPCC*. Cambridge University Press.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2012). *Community-based disaster risk reduction*. IFRC.

Irawan, A. (2012). The implementation of sustainable food agriculture land protection policy in Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, *5*(9), 67.

Isard, W. (1956). *Location and Space-Economy: A General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land Use, Trade, and Urban Structure*. MIT Press.

Isenberg, D. J. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship. *The Babson Entrepreneurship Ecosystem Project*, *7*(1), 1-13.

Isserman, A. M. (1977). The location quotient approach to estimating regional economic impacts. *Journal of the American Institute of Planners*, *43*(1), 33-41. https://doi.org/10.1080/01944367708977758

Isaac, T. M. T., & Franke, R. W. (2002). *Local democracy and development: People's campaign for decentralized planning in Kerala*. Rowman & Littlefield.

Jabareen, Y. R. (2006). Sustainable Urban Forms: Their Typologies, Models, and Concepts. *Journal of Planning Education and Research*, *26*(1), 38–52. https://doi.org/10.1177/0739456X05285119

Jacobs, J. (1961). *The death and life of great American cities*. Random House.

Jeong, H., Shin, Y., Lee, S., Han, S., & An, K. (2025). Identifying Local Characteristics for Customized Policy Application Within Rural Areas Using LDA Topic Modelling. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su17125332

Jha, A. K., Miner, T. W., & Stanton-Geddes, Z. (Eds.). (2013). *Building urban resilience: Principles, tools, and practice*. The World Bank.

Jones, D. W., et al. (2022). Land use conflict in the peri-urban interface of a rapidly urbanizing city in Southeast Asia. *Land Use Policy*, *112*, 105822.

Jones, G. A. (2017). The politics of urban development. In *The Wiley-AIA Companion to Architecture and Urbanism*. John Wiley & Sons.

Joshi, A. (2013). Do they work? Assessing the impact of transparency and accountability initiatives in service delivery. *Development Policy Review*, *31*(s1), s29-s48.

Jumarang, M. I., et al. (2021). The role of small reservoirs (embung) in supporting agricultural water needs and increasing cropping intensity. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *708*(1), 012046.

Kabeer, N. (2003). *Gender mainstreaming in poverty eradication and the millennium development goals: A handbook for policy-makers and other stakeholders*. Commonwealth Secretariat.

Kabir, M., & Martinez-Vazquez, J. (2012). *Decentralization and development: The Thai experience*. Edward Elgar Publishing.

Kaufmann, D., & Bellver, A. (2005). *Transparenting transparency: Initial empirics and policy applications*. The World Bank.

Kellerman, A. (1989). Agricultural location theory, 1: Basic models. *Environment and Planning A*, *21*(10), 1381–1396. https://doi.org/10.1068/a211381

Kelly, R. (2013). *Making the property tax work*. Lincoln Institute of Land Policy.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). (2016). *Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun*.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). (2021). *Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030*.

Kementerian Keuangan. (2022). *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*. Kementerian Keuangan RI.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2016). *Peraturan Menteri LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial*.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). *Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2021*. KLHK.

Kingdom, B., Li, R., & van den Berg, C. (2006). *The challenge of reducing non-revenue water (NRW) in developing countries: How the private sector can help*. World Bank.

Kriebel, D., Tickner, J., Epstein, P., Lemons, J., Levins, R., Loechler, E. L., ... & Stoto, M. (2001). The precautionary principle in environmental science. *Environmental Health Perspectives*, *109*(9), 871–876.

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). Sage publications.

Krugman, P. (1991). *Geography and Trade*. MIT Press.

Kuncoro, M. (2013). *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. UPP STIM YKPN.

Kurniawan, B., & Tisnanta, H. (2020). Participatory rural appraisal (PRA) in the formulation of the village medium-term development plan (RPJMDes). *Geographia Technica*, *15*(1), 58-70.

Kurniawan, T. A., Othman, M. H. D., Liang, X., Goh, H. H., Gikas, P., & Chang, J. S. (2021). Challenges and opportunities for municipal solid waste management in Indonesia: A case study of Jakarta. *Journal of Environmental Management*, *293*, 112812.

Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system: A handbook for development practitioners*. The World Bank.

Kusumawati, A. (2019). The effectiveness of e-samsat in increasing motor vehicle tax revenue in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, *20*(2), 115-126.

Kusumawardhani, R. A., & Taryono. (2022). Inter-village learning for rural development: A case study of

benchmarking programs in Yogyakarta, Indonesia. *Forest and Society*, *6*(1), 325-341.

Labolo, M., & Moko, M. (2019). The role of social capital in the implementation of the Village Fund Program in Gorontalo Province, Indonesia. *Journal of Social and Development Sciences*, *10*(2), 1-10.

Lansing, J. S. (1991). *Priests and programmers: Technologies of power in the engineered landscape of Bali*. Princeton University Press.

Levinson, M. (2006). *The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger*. Princeton University Press.

Lewis, B. D. (2015). Addressing the 'problem' of the village: The new law on villages in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, *37*(1), 82-104. https://www.jstor.org/stable/24916538

Lewis, B. D. (2015). The impact of fiscal decentralization on local government performance in Indonesia. *Publius: The Journal of Federalism*, *45*(4), 620-642. https://doi.org/10.1093/publius/pjv021

Liao, L., Long, H., & Chen, K. (2021). Rural brain drain: The impacts of education and out-migration on human capital in rural China. *Journal of Rural Studies*, *86*, 283-292.

Lipton, M. (1977). *Why Poor People Stay Poor: Urban Bias in World Development*. Harvard University Press.

Listyanto, H., & Haryono, E. (2021). The transformation of a poor village into a self-sufficient tourist village: The case of Ponggok Village, Central Java, Indonesia. *GeoJournal of Tourism and Geosites*, *36*(2), 524-531.

Litman, T. (2022). *Evaluating Active Transport Benefits and Costs*. Victoria Transport Policy Institute.

Liu, Y., Zang, Y., & Yang, Y. (2020). China's rural revitalization and development: Theory, technology and management. *Journal of Geographical Sciences*, 30, 1923 - 1942. https://doi.org/10.1007/s11442-020-1819-3

Lösch, A. (1954). *The Economics of Location* (W. H. Woglom & W. F. Stolper, Trans.). Yale University Press. (Original work published 1940).

Manasan, R. G. (2015). *The internal revenue allotment: A review of its history, performance, and prospects*. Philippine Institute for Development Studies.

Mansuri, G., & Rao, V. (2013). *Localizing development: Does participation work?*. World Bank.

Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi.

Mardijono, R. A., et al. (2020). The role of e-government in improving public services in Surabaya City, Indonesia. *Public Policy and Administration Research*, *10*(7), 28-35.

Maryati, S., & Fariha, S. (2022). The effectiveness of the village financial system (Siskeudes) application in improving village financial management accountability. *Journal of Accounting and Investment*, *23*(1), 169-185.

McCann, P. (2013). *Modern Urban and Regional Economics* (2nd ed.). Oxford University Press.

McCauley, D. J., et al. (2018). *Managing village assets: A guide for village governments in Indonesia*. The Asia Foundation.

Miller, R. E., & Blair, P. D. (2009). *Input-Output Analysis: Foundations and Extensions* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Mintzberg, H. (1994). The fall and rise of strategic planning. *Harvard Business Review*, *72*(1), 107-114.

Mishra, S. K., & Nathan, H. S. K. (2021). Human Development Index: The basic, importance and limitations. *Journal of Economic and Social Thought*, *8*(2), 114-126.

Mitlin, D., & Satterthwaite, D. (2013). *Urban poverty in the global south: Scale and nature*. Routledge.

Mohamed, A., Worku, H., & Lika, T. (2020). Urban and regional planning approaches for sustainable governance: The case of Addis Ababa and the surrounding area changing landscape. *Cities & Health*, 8, 100050. https://doi.org/10.1016/j.cacint.2020.100050

Moser, C. O. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice, and training*. Routledge.

Mounce, S. R., Mounce, R. B., & Boxall, J. B. (2014). The internet of things and the water sector. In *The Internet of Things*. Springer.

Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-developed Regions*. Gerald Duckworth & Co.

Narayan, D. (1995). *The contribution of participation to development*. The World Bank.

Nguyen, C. V., et al. (2021). The impact of migration and remittances on household welfare: Evidence from Vietnam. *Journal of Development Studies*, *57*(5), 849-866.

North, D. C. (1955). Location Theory and Regional Economic Growth. *Journal of Political Economy*, *63*(3), 243–258.

Novelli, M., & Koutra, C. (2013). The dark side of tourism: a case of community-based tourism in a developing country. *Tourism and Hospitality Research*, *13*(2), 85-96.

Nugroho, I. P., et al. (2021). Community-based ecotourism in Nglanggeran Ancient Volcano: A contribution to geoheritage conservation and sustainable development. *Geotourism, Geoheritage and Geoconservation*, *1*, 100004.

Ortúzar, J. de D., & Willumsen, L. G. (2011). *Modelling transport* (4th ed.). John Wiley & Sons.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Padeiro, M. (2016). The effects of Floor Area Ratio regulation on land use and property prices: A literature review. *Journal of Urban Design and Spatial Planning*, *4*(2), 1-21.

Parr, J. B. (1999). Growth-pole strategies in regional economic planning: a retrospective view. Part 1. Origins and advocacy. *Urban Studies*, *36*(7), 1195–1215.

Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. University of California Press.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Perroux, F. (1955). Note sur la Notion de 'Pôle de Croissance'. *Économie Appliquée*, *8*(1-2), 307-320.

Podger, O. (2017). The Village Law: a step towards democratic and equitable development in Indonesia? *Journal of Contemporary Asia*, *47*(4), 547-568.

Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. *Harvard Business Review*, *76*(6), 77–90.

Prasojo, E., Kurniawan, T., & Rudita, A. (2017). The Bureaucratic Politics of Local Development Planning and Budgeting in Indonesia. *Policy and Society*, *36*(3), 358-372. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1373511

Pratama, A. R. (2021). Digital transparency and accountability in village governance: A case study of village websites in Indonesia. *Government Information Quarterly*, *38*(3), 101594.

Pratt, A. C. (2005). Cultural industries and public policy: An oxymoron? *International Journal of Cultural Policy*, *11*(1), 31-44.

Pretty, J. N., Guijt, I., Thompson, J., & Scoones, I. (1995). *A trainer's guide for participatory learning and action*. IIED.

PricewaterhouseCoopers (PWC). (2019). *Digitalization of tax administration in Southeast Asia*. PWC.

Project Management Institute. (2017). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (6th ed.).

Purnomo, E. P. (2020). *BUMDes dan BUMDesma: Pilar Ekonomi Desa*. Grasindo.

Purnomo, E. P., Fathani, T. F., & Hidayat, R. (2021). The role of the village fund in promoting fiscal independence: Evidence from Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, *8*(2), 263-277.

Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, *6*(1), 65-78.

Putri, A. D., & Isnowati, S. (2019). The implementation of One Village One Product (OVOP) program in Central Java, Indonesia. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, *3*(06).

Rakatama, A., & Pandit, R. (2020). Reviewing the Climate-Smart Agriculture approach: The case of Indonesia. *Land*, *9*(5), 150.

Rappaport, J. (1987). Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology. *American Journal of Community Psychology*, *15*(2), 121-148.

Ravindra, A. (2004). *An assessment of the impact of Bangalore citizen report cards on the performance of public agencies*. The World Bank.

Reardon, T., Barrett, C. B., Berdegué, J. A., & Swinnen, J. F. (2009). Agrifood industry transformation and small farmers in developing countries. *World Development*, *37*(11), 1717-1727.

Rey, S. J., & Montouri, B. D. (1999). US Regional Income Convergence: A Spatial Econometric Perspective. *Regional Studies*, *33*(2), 143–156.

Rockefeller Foundation. (2014). *City resilience framework*. Rockefeller Foundation.

Rondinelli, D. A. (1993). *Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration* (2nd ed.). Routledge.

Rose-Ackerman, S. (2006). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform*. Cambridge University Press.

Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.

Rossman, L. A. (2000). *EPANET 2: Users manual*. US Environmental Protection Agency.

Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.

Rypkema, D. D. (2008). Heritage conservation and the local economy. *Global Urban Development Magazine*, *4*(1), 1-9.

Sakai, M., & Fauzia, A. (2021). Village fund, village politics and the 2019 elections in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, *51*(2), 274-295.

Schreckenberg, K., & Luttrell, C. (2009). Devolution and user groups: challenges for forest and natural resource management. In *Devolution and the social management of forests*. Center for International Forestry Research (CIFOR).

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Setiawan, B., & Riyadi, S. (2020). The challenges of vertical and horizontal coordination in Indonesian development planning. *Public Policy and Administration Research*, *10*(5), 22-31.

Simanjuntak, R. (2018). *Ekonomi Keuangan Publik*. Penerbit Erlangga.

Singh, S., & Vutukuru, V. (2010). *Social audits: A toolkit for performance monitoring and advocacy*. The World Bank.

Siscawati, M., et al. (2017). *Recognizing customary forests and territories in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR).

Smolka, M. O. (2013). *Implementing value capture in Latin America: Policies and tools for urban development*. Lincoln Institute of Land Policy.

Soetardjo, K. (1984). *Dasar-dasar dan Struktur Pemerintahan Desa*. Alumni.

Sohail, M., & Cavill, S. (2008). Community-based management in the water and sanitation sector: a review. *Water Policy*, *10*(4), 393-410.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, *70*(1), 65–94. https://doi.org/10.2307/1884513

Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartono, R. (2020). Understanding the determinants of stunting in Indonesia. *Maternal & Child Nutrition*, *16*(2), e12938. https://doi.org/10.1111/mcn.12938

Srinivas, H. (2021). The Delphi Technique: A planning and forecasting tool. *GDRC Research Output*. https://www.gdrc.org/decision/delphi.html

Starkey, P. (2001). *Local transport solutions: People, paradoxes and progress*. SSATP Working Paper No. 56. World Bank.

Steinfeld, E., & Maisel, J. L. (2012). *Universal design: Creating inclusive environments*. John Wiley & Sons.

Stilwell, F. (2012). *Political Economy: The Contest of Economic Ideas* (3rd ed.). Oxford University Press.

Streeten, P., Burki, S. J., Haq, M. U., Hicks, N., & Stewart, F. (1981). *First Things First: Meeting Basic Human Needs in the Developing Countries*. Oxford University Press.

Suharko, S., et al. (2020). The roles and challenges of village facilitators (pendamping desa) in the implementation of the Village Law in Indonesia. *Community Development Journal*, *51*(2), 243-259.

Suharko, S., et al. (2021). The role of village-owned enterprises (BUMDes) in rural economic development: A case study of Amarta BUMDes in Sleman,

Yogyakarta. *Journal of Socioeconomics and Development*, *4*(1), 1-13.

Sui, Y., & Lin, T. (2021). Village planning in the context of rural revitalization: A case study of participatory planning in Zhejiang, China. *Land*, *10*(7), 743. https://doi.org/10.3390/land10070743

Sukamdi, S., et al. (2014). *Mobilitas penduduk dan pembangunan di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Sussman, J. M. (2005). *Perspectives on intelligent transportation systems (ITS)*. Springer.

Sutanto, A., & Nurini, N. (2018). The development of green city concept in Surabaya through public participation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *126*(1), 012134.

Tacoli, C. (2006). *The Earthscan reader in rural-urban linkages*. Earthscan.

Talen, E. (2002). The Social Goals of New Urbanism. *Housing Policy Debate*, *13*(1), 165-188.

Talja, H. (2006). The practice of zoning in land-use planning. *Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research*, *3*(1), 7-23.

Tambunan, T. T. H., & Hudalah, D. (2021). Commuting and the dynamics of a mega-urban region: The case of Jabodetabek, Indonesia. *Urban Studies*, *58*(1), 183-200.

Tauli-Corpuz, V. (2013). The concept of free, prior and informed consent. In *Indigenous Peoples' Rights*. International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

Timothy, D. J. (2011). *Cultural heritage and tourism: An introduction*. Channel View Publications.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson.

Tomlinson, R. (2019). *Thinking about GIS: Geographic Information System Planning for Managers* (5th ed.). Esri Press.

Tönnies, F. (1887). *Gemeinschaft und Gesellschaft* (Community and Society).

United Nations (UN). (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN General Assembly.

United Nations (UN). (2022). *E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government*. UN.

United Nations Development Programme (UNDP). (1990). *Human Development Report 1990*. Oxford University Press.

United Nations Development Programme (UNDP). (2009). *Capacity Development: A UNDP Primer*. UNDP.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. UNISDR.

UN-Habitat. (2003). *The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003*. Earthscan Publications.

UN-Habitat. (2016). *Urbanization and Development: Emerging Futures. World Cities Report 2016*. UN-Habitat.

Vanclay, F. (2003). Conceptual and methodological advances in social impact assessment. In *The International Handbook of Social Impact Assessment*. Edward Elgar.

W.K. Kellogg Foundation. (2004). *Logic model development guide*. W.K. Kellogg Foundation.

Wang, H., Xie, J., & Li, H. (2005). Water tariff reforms in urban China. *Water Policy*, *7*(1), 85-98.

Wang, J., Qu, L., Li, Y., & Feng, W. (2023). Identifying the structure of rural regional system and implications for rural revitalization: A case study of Yanchi County in northern China. *Land Use Policy*. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106436

Warwick, H. (2014). The politics of planning. In *The Routledge Companion to Planning in the Global South*. Routledge.

Waterson, R. (1993). *The Living House: An Anthropology of Architecture in South-East Asia*. Oxford University Press.

Watkins, M. H. (1963). A Staple Theory of Economic Growth. *The Canadian Journal of Economics and Political Science*, *29*(2), 141-158.

Weber, A. (1929). *Theory of the Location of Industries* (C. J. Friedrich, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1909).

Webster, D. (2002). On the edge: Shaping the future of the peri-urban fringe. In *The Peri-Urban Interface: A Tale of Two Cities*. SEI.

Weihrich, H. (1982). The TOWS matrix, A tool for situational analysis. *Long Range Planning*, *15*(2), 54-66. https://doi.org/10.1016/0024-6301(82)90120-0

Weiss, E. B. (1990). In Fairness to Future Generations. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, *32*(3), 7-31.

Whitzman, C., et al. (2008). *The-gender-inclusive-city: A-handbook-for-urban-planners-and-decision-makers*. UN-Habitat.

Widianingsih, I., et al. (2020). From top-down to bottom-up: The new paradigm of development planning in Indonesia after the decentralization reform.

International Journal of Public Administration, *43*(14), 1205-1215.

Willekens, F. (2021). The cohort-component model of population projection. *Demographic Research*, *44*, 997-1036. https://doi.org/10.4054/DemRes.2021.44.42

Wirth, L. (1938). Urbanism as a Way of Life. *American Journal of Sociology*, *44*(1), 1-24.

Woltjer, J., et al. (2014). *Governing the mega-urban regions of Jakarta and Manila: A comparative analysis of planning and governance*. Routledge.

Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, *15*(2), 225-249.

World Bank. (2018). *The Implementation of the Village Law: A Qualitative Study*. The World Bank.

World Bank. (2018). *The Urbanization of Poverty*. The World Bank.

World Bank. (2020). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. The World Bank.

World Bank. (2021). *Connecting to Compete 2021: Trade Logistics in the Global Economy*. The World Bank.

World Commission on Environment and Development (WCED). (1987). *Our Common Future*. Oxford University Press.

World Health Organization. (2019). *Guidelines on sanitation and health*. WHO.

Xu, H., Pittock, J., & Daniell, K. (2021). China: A New Trajectory Prioritizing Rural Rather Than Urban Development?. *Land*, 10, 514. https://doi.org/10.3390/land100514

Xu, S., & Gao, H. (2025). Navigating Research Frontiers in China's Rural Planning: A Bibliometric Analysis of Sustainable Development. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su17010340

Yang, K. (2025). Integrating geographical information systems into urban-rural planning for equitable and sustainable urban development. *Information Development*. https://doi.org/10.1177/02666669251339133

Yulianto, A., Hidayaturahmi, A., & Triyulianto, T. (2025). The Impact of Globalization on Regional Development Urban and Rural Sustainable Development in Indonesia. *West Science Interdisciplinary Studies*. https://doi.org/10.58812/wsis.v3i07.2045

Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2019). Who are the poor and how are they poor? A new poverty profile for Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *55*(2), 147-173. https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1518382

Yushkova, N., & Nikiforova, D. (2022). Urban planning aspects of interaction between regional settlement systems and industrial areas subjected to special modes of operation. *Vestnik MGSU*. https://doi.org/10.22227/1997-0935.2022.7.845-870

Zhan, L., Wang, S., Xie, S., Zhang, Q., & Qu, Y. (2023). Spatial path to achieve urban-rural integration development − analytical framework for coupling the linkage and coordination of urban-rural system functions. *Habitat International*. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102953

Zhang, A. (2025). Analysis of the Sustainable Development Pathway of Urban–Rural Integration from the Perspective of Spatial Planning: A Case Study of the Urban–Rural Fringe of Beijing. *Sustainability*. https://doi.org/10.3390/su17051857

Zhang, S., Sun, K., Zhao, H., Yao, H., & Shen, L. (2025). Research on the Construction and Practice of an Urban–Rural Integration Planning Model from the Perspective of Element Flow: A Case Study of Xiuzhou District, Jiaxing City. *Land*. https://doi.org/10.3390/land14051067